

## **DAFTAR BACAAN**

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Badan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 214 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Instruksi Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Pengajuan Kredit Tanpa Agunan Pekerja Migran Indonesia Oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

**Buku :**

Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Adi, Rianto, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2004.

Asshidiqie, Jimly, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Asshidiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang, Rajagrafindo, Yogyakarta, 2010.

Attamimi, A. Hamid, UUD 1945-Tap MPR Undang-Undang (Kaitan Norma Hukum Ketiganya), Jakarta, 1981.

Bertens, K. Etika, Gramedia, Jakarta, 2011.

Christiani, Th. Anita, Hukum Perbankan, Universitas Atma JayaPers, Yogyakarta, 2010.

Darumurti, Khrisna Djaya, Diskresi Kajian Teori Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.

Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Hadjon, Philipus M., Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.

Huda, Ni'matul, Negara Hukum demokrasi dan judicial Review, Cetakan Pertama UII Press, Yogyakarta, 2005.

Huda, Ni'matul, Otonomi Daerah : Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

- Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Isnaeni, Moch., Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
- Keraf, Sonny, Etika Bisnis dan Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Manan, Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH UII, Yogyakarta, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan 13, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Nurcholis, Hanafi, Teori dan Praktek Pemberitaan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2005.
- Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung pers, Bandar Lampung, 2009.
- Putra, Lili Rasjidi dan I.B. Wysa, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.
- Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rahayu, Ani Sri, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Malang, 2017.
- S., H.R. Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Savitri, Niken, HAM Perempuan – Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, ctk pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Shidarta, Darji Darmodiharjo, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Sinamo, Nomensen, Hukum Administrasi Negara, Permata Aksara, Jakarta, 2016.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.Ketiga, UI Press, Jakarta. 1986.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2006.

Syamsuddi, Aziz, Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Thalib, F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Thomas, Suyatno, Kelembagaan Perbankan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

Tjandra, Guus Heerma Van Voss dan Surya, Bab-bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.

Tutik, Titik Triwulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana, Jakarta, 2001.

Widyosiswoyo, Hariwijaya Soewandi, Supartono, Ilmu Alamiah Dasar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.

#### **Jurnal :**

Arifin, Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional dan Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Vol. 3, 2015.

Nurmayani dan Farida Mery, Problematika Konsep Diskresi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Jurnal Ilmiah Hukum dan HAM (JIHAM) Vol. 1, No 1, 2021

Rahayu, Sri Lestari, Perlindungan HAM Pekerja Migran : Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma Hukum Internasional, Jurnal tidak dipublikasikan, Yustisia Edisi 85 januari 2013.

#### **Seminar Ilmiah :**

Koesrianti, Responsibility of State on the Protection of Migrant Workers in Informal Sectors:A Case of Indonesia, Makalah disampaikan pada 2013 DILA International Conference: Asian Ideas of International Law, diselenggarakan oleh Universitas Airlangga & The Foundation for the Development of International Law in Asia, Surabaya, 4 – 8 Juni 2013.

T., Sulaiman, Makalah dengan Judul : Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Seminar Center for Indonesia Migrant Workers di Jakarta pada tanggal 5 November 2001.

**Website :**

<https://www.migrantcare.net>

<https://media.neliti.com/media/publications/137082-ID-peran-migrant-care-dalam-mengadvokasi-ke.pdf>

<https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>

<http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>

[http://www.policy.hu/suharto/modul\\_1/makindo\\_35.htm](http://www.policy.hu/suharto/modul_1/makindo_35.htm)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Migrant\\_worker](http://en.wikipedia.org/wiki/Migrant_worker)

<http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r158.htm>

<https://sbmi.or.id/biaya-penempatan-mahal-penyebab-penyekapan-tki/>

<https://stipjakarta.ac.id/biaya-diklat-keterampilan-pelaut/#:~:text=Biaya%20Revalidasi%20Sertifikat%20%3A%20Rp.%20350.000,%20%3A%20Rp.%2075.000%20per%20orang>

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/selong/id/data-publikasi/berita-artikel-terbaru/2876-mengenal-konflik-kepentingan,-upaya-penting-cegah-tindakan-korupsi.html>

<https://bp2mi.go.id/berita-detail/luncurkan-pembebasan-biaya-penempatan-pmi-melalui-kur-dan-kta-dari-bni-kepala-bp2mi-selamat-tinggal- pesta-pora-para-rentenir>

<https://economy.okezone.com/read/2019/10/16/320/2117581/kredit-usaha-untuk-tki-biang-kerok-kredit-macet?page=1>

<https://www.bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/bersama-kementerian-dan-perwakilan-bp2mi-bahas-penempatan-dan-pelindungan-pmi-ke-polandia>

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5676874/vaksin-corona-apa-yang-paling-banyak-diterima-di-luar-negeri-ini-datanya>

## **LAMPIRAN**